

BAB I

PENDAHALUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebakaran didefinisikan sebagai api yang tidak terkendali, berada di luar kemampuan dan keinginan manusia, kebakaran merupakan kejadian yang tidak diinginkan dan terkadang tidak dapat dikendalikan, kebakaran timbul dari pembakaran suatu bahan di udara yang menghasilkan energi panas dan nyala api. Pemadam kebakaran merupakan implementasi dari salah satu tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat. Selain itu, pemadam kebakaran melindungi dan mengamankan objek vital pemerintahan dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran setidaknya memuat: (Sochatman, 2020).

1. Layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran.
2. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran.
3. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.
4. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.
5. Layanan pendataan, inspeksi, dan investigasi pasca kebakaran.

Banyaknya anggota pemadam kebakaran yang melakukan tugas pokok ditengah masyarakat hanya berbekal pengalaman yang pernah dilalui tanpa memiliki bekal secara matang baik itu pengetahuan maupun teknis, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kekeliruan pada saat melaksanakan tugasnya, hal ini terjadi karena anggota pemadam kebakaran belum diikutsertakan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar pemadam kebakaran. Dilihat dari urgensi tersebut maka pendidikan dan pelatihan untuk anggota pemadam kebakaran sangatlah penting karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah, dijelaskan bahwa setiap anggota pemadam kebakaran memiliki persyaratan umum, persyaratan khusus dan kualifikasi untuk menjadi anggota pemadam kebakaran sesuai dengan jenis jabatan pemadam kebakaran itu sendiri.

Salah satu pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti oleh setiap anggota pemadam kebakaran adalah pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran tingkat I (Pemadam kebakaran pemula). Pemadam kebakaran tingkat I merupakan pemadam yang memiliki tupoksi untuk dapat memadamkan kebakaran dengan alat pemadam api ringan, mampu menggunakan peralatan pemadaman jenis hidran, mampu menggunakan dan memelihara peralatan pelindung diri (*fire jacket*, helm, dan *safety shoes* serta sarung tangan) secara cepat dan tepat, mampu melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), dan mampu melaksanakan sistem tali temali untuk pengaman dan penyelamatan korban. (Ahmad Faisol, 2021). Pada

pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran tingkat I ini, anggota pemadam kebakaran akan diberikan pengetahuan dasar sesuai dengan standar kualifikasi yang berlaku baik secara teori maupun praktek. Pendidikan dan pelatihan yang ditempuh untuk anggota pemadam kebakaran tingkat I berdurasi dalam waktu satu minggu dengan total 70 Jam Pelajaran. Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, anggota pemadam kebakaran akan mendapatkan laporan akhir berupa sertifikat yang menyatakan bahwa anggota tersebut telah mengikuti proses pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran tingkat I. Proses pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan pada tempat khusus yaitu pusat pendidikan dan pelatihan kebakaran. (Sardiman, 2021).

Tentunya setiap bidang memiliki peran dan tanggung jawab yang besar bagi seorang petugas pemadam kebakaran. Dilihat dari banyaknya kejadian kebakaran di Indonesia sudah tentu seorang pemadam kebakaran harus mempunyai keahlian dalam tiga bidang tersebut, salah satunya pada bidang penyelamatan. Bidang penyelamatan untuk seorang pemadam kebakaran sangatlah penting karena tuntutan lapangan ketika terjadinya bencana, maka pemadam kebakaran harus mampu melakukan penyelamatan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain (korban). Dalam hal ini, maka proses diklat yang diikuti oleh pemadam kebakaran untuk bidang penyelamatan akan melatih para pemadam kebakaran untuk bisa melakukan penyelamatan baik pada bencana kebakaran maupun bencana lainnya. (Bernard Raho, 2020).

Perkembangan Kabupaten Jombang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan kemajuan ditandai dengan pertambahan jumlah penduduk yang setiap tahun mengalami kenaikan. Pertambahan jumlah penduduk ini biasanya mengakibatkan bertambahnya jumlah perumahan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Kondisi yang demikian memiliki dampak atau ancaman yang membahayakan masyarakat apabila terjadi kebakaran dan bencana yang tidak diduga.

Berikut adalah data kejadian kebakaran yang dapat ditangani oleh petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan perhitungan tingkat waktu tanggap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang:

Tabel 1.1 Data kejadian kebakaran di Kabupaten Jombang

NO	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN
1	2021	82
2	2022	86
3	2023	232
4	2024	206

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang

Pemadam Kebakaran di daerah Kabupaten Jombang tidak hanya bertugas mengatasi kebakaran saja. Namun juga mempunyai tugas untuk penyelamatan manusia, binatang dan harta benda. Di kabupaten jombang petugas pemadam kebakaran seluruhnya berjumlah 34 personil yang bertugas di setiap Pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Masing-masing WMK mempunyai tugas untuk melakukan inspeksi secara berkala terhadap peralatan proteksi kebakaran, melakukan mitigasi kebakaran, bersosialisasi dan menyediakan sarana dan prasarana tanggap darurat, pos pelayanan pemadam kebakaran WMK dan yang paling penting adalah mempunyai petugas pemadam kebakaran yang terlatih dan bersertifikasi. Pemadam kebakaran dan penyelamatan BPBD Kabupaten Jombang mempunyai satu kantor Induk yang berada di Jl. KH. Wahid Hasyim No.141, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang dan Pos WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) yang berada di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Ploso.

Wilayah Manajemen Kebakaran ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time rate*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat sampai tempat kejadian kebakaran. Wilayah Manajemen Kebakaran harus memiliki petugas pemadam kebakaran yang telatif dan bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan penyemprotan racun api serta alat pendukung pemadam pi yang sesuai dengan tipologi kebakaran. Damkar di Jombang terdapat ada 4 WMK, yaitu Pos DAMKAR Ploso membawai 5 Kecamatan, Pos DAMKAR Mojoagung membawai 5 kecamatan, Pos DAMKAR Ngoro membawai 5 kecamatan dan Pos DAMKAR Jombang Kota membawai 6 kecamatan. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Jombang belum memiliki rencana untuk menjadikan urusan pemadam kebakaran sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mandiri. Jombang

termasuk salah satu dari 30 kabupaten/kota di Jawa Timur yang tercatat belum memiliki dinas damkar. Sejauh ini, urusan pemadam kebakaran di Jombang masih berada di bawah naungan BPBD.

Dalam Kabupaten Jombang yang telah menjadi pusat kota dengan berbagai macam kegiatan yang terus berkembang seperti kegiatan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan. Kabupaten ini sedang mengalami tahap perkembangan yang ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, perubahan lahan sangat penting dalam mendukung kehidupan masyarakat kota baik dalam segi penyediaan sarana dan prasarana umum, maupun penyediaan lahan untuk tempat bermukim, dengan semakin banyaknya perubahan lahan terbuka menjadi lahan terbangun.

Perubahan ini memaksa penyediaan lahan menjadi semakin besar dan apabila lahan tidak mungkin lagi untuk di konversi maka terjadi pemadatan pemukiman penduduk. Kawasan pemukiman yang dihuni terlalu banyak penduduk dan terjadi ketidakseimbangan antara lahan dengan bangunan yang ada. Kawasan padat pemukiman sangat memungkinkan terjadinya sambungan listrik liar yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana kebakaran di pemukiman.

Kota ini sangat rawan terhadap bencana kebakaran dikarenakan kawasannya terdapat banyak pemukiman padat penduduk, kawasan ini merupakan daerah yang rentan terhadap terjadinya bencana kebakaran bahkan setiap tahunnya angka kejadian kebakaran di kota Batu semakin

meningkat. Dengan ini, di dukung oleh perkembangan dan pembangunan Kota Batu yang telah bertambah disertai semakin berkembangnya bangunan gedung-gedung bertingkat, hotel, perkantoran, pusat-pusat pertokoan dan pemukiman penduduk. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan resiko kebakaran. (Harimawan, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan meneliti mengenai Sumber Daya manusia (SDM) petugas pemadam kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang. Penelitian analisis sumber daya manusia petugas pemadam kebakaran akan berfokus pada kualifikasi serta pengembangan dan pelatihan SDM yang kemudian dianalisis sesuai dengan standar nasional yaitu Permendagri Nomor 16 tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di daerah pada BPBD Kabupaten Jombang?
- b) Apa saja kendala dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di daerah pada BPBD Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mendeskripsikan lebih mendalam tentang implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang
- b) Untuk mendeskripsikan lebih mendalam tentang kendala dalam pemenuhan kualifikasi sumber daya manusia petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Jombang dan bagaimana solusinya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran (Studi Kasus Di BPBD Kabupaten Jombang) memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis.

a) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran dan menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti, kalangan akademis, dan masyarakat.

b) Manfaat Praktis

1. Untuk Mahasiswa

Penelitian ini sebagai media pembelajaran dan pengaplikasian di

lapangan dari materi yang telah dipelajari dalam perkuliahan.

2. Untuk Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pembelajaran untuk membantu mahasiswa yang akan mencari referensi yang sesuai dengan judul peneliti.

3. Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang

Sebagai bahan evaluasi bagi BPBD Kabupaten Jombang dalam pemenuhan standar kualifikasi petugas pemadam kebakaran sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di daerah.